



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
 LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
 UNIT KERJA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD ILYAS
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 459449

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.500.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m ² /48 m ² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m ² /85 m ² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	102.000.000
1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA 2DP Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA MATIC 4 TAK Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000		
4. MOTOR, YAMAHA MATIC 4 TAK Tahun 2011, LAINNYA Rp. 2.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	31.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	127.004.489
F. HARTA LAINNYA	Rp.	3.000.000
Sub Total	Rp.	1.763.004.489
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.763.004.489

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.